



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 367 - 375

Pembentukan Sikap Demokrasi Melalui Musyawrah Mufakat Pada Pengurus HMPS PPKn

Tarsius Galut¹, Suciati², Didik Iswahyudi³

*Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia

tarsygalut@gmail.com*

Informasi artikel

Kata kunci:
Demokrasi, sikap
dan musyawarah

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan Pembentukan Sikap Demokrasi Melalui Fungsi Musyawarah Pada Pengurus HMPS PPKn, demokrasi yang melakukan penguatan dalam pembentukan warga negara yang baik, musyawarah untuk mengesepakati kesepakatan bersama dan juga menanggungjawabkan tugas masing-masing dalam melaksanakan kegiatan yang ditetapkan HMPS PPKn, Pendekatan yang digunakan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian. 1) cara pembentukan sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah pada pengurus HMPS PPKn melalui musyawarah seluruh mahasiswa PPKn. 2) hambatan yang dirasakan pada pengurus HMPS PPKn adalah pengurus masih banyak pengurus yang tidak konsisten dengan waktu yang ditetapkan ketua HMPS PPKn. 3) solusi dari hambatan pada pengurus HMPS PPKn adalah setiap musyawarah ketua HMPS PPKn tegas dalam memimpin setiap pertemuan dan juga menghimbau supaya pengurus HMPS PPKn berkerja sama dan juga hadir tepat waktu saat musyawarah berlangsung. Kesimpulan diatas bahwa pembentukan sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah pada pengurus HMPS PPKn melalui musyawarah semua pengurus HMPS PPKn harus konsisten dengan waktu, dan juga berkerja sama guna untuk melancarkan kegiatan atau musyawarah berlangsung.

Copyright ©2019 Tarsius Galuta¹, Suciati², Didik Iswahyud³. All Right Reserved

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang di Asia, Perkembangan serta pembangunan serta sistem di Indonesia masih butuh pembenahan yang signifikan, pembenahan tersebut tidak lari jauh dari peran mahasiswa, Mahasiswa adalah harapan dan moral bangsa untuk mencapai tujuan yang baik. (Purnomo, 2018) Keterlibatan mahasiswa dalam setiap perubahan di masyarakat dan tatanan kenegaraan selama ini sudah menjadi jargon dan pilar utama terjaminnya sebuah tatanan kenegaraan yang demokratis. Romantisme politik antara mahasiswa dengan rakyat terlihat sebagai fungsinya sebagai social control termasuk terhadap kebijakan menindas.

(Budiyono & Kokotiasa, 2018) mahasiswa merupakan harapan terbesar masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat terutama sebagai perubahan di masyarakat. mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu diperguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa individu yang menimba ilmu diperguruan tinggi untuk Keterlibatan mahasiswa dalam setiap perubahan dalam suatu masyarakat sebagai tatanan negara sebagai negara demokrasi. Mahasiswa harus mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi agar perannya sebagai agen perubahan dimasyarakat bisa semakin optimis. Romantisme politik antar mahasiswa dengan rakyat terlihat sebagai fungsinya sebagai sosial control termasuk terhadap kebijakan yang ada didalam suatu masyarakat

(Wulan & kk, 2014) Mahasiswa adalah peserta didik KBBI) mahasiswa adalah siswa yang belajar pada Perguruan Tinggi. Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, sementara itu Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang secara formal disertai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi dapat tercapai apabila *Tridharma* Perguruan Tinggi dapat terlaksana, yaitu mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian pada masyarakat (Mukmin & Prayetno, 2018) Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang diyakini serta mampu bersaing dan mengharumkan nama baik bangsa, juga mampu menyatuhkan serta menyampaikan pikiran dan hati nurani untuk memajukan bangsa, namun mahasiswa juga pelaku masyarakat. Mahasiswa merupakan bagian masyarakat idealnya, mahasiswa sebagai panutan dalam masyarakat belandaskan dengan pengetahuannya dengan tingkat pendidikan, norma-norma yang berlaku disekitar dan pola pikirnya. Sebagai seorang pelajar juga bagian dari masyarakat karena mahasiswa memiliki peran penting dan menyeluruh dalam suatu *agen of change, sosial control*. Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri sebagai mana peran besar yang dilakukan mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa melalui ide dan pikiran cerdas seorang mahasiswa mampu berubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama dan suatu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan.

(Goldstein, 2010) Istilah organisasi dalam bahasa Inggrisnya "Organization" yang berarti "hal yang mengatur" dan kata kerjanya "organizing", berasal dari bahasa Latin "Organizare" yaitu mengatur atau menyusun. Sebelum penulis memberikan arti tentang organisasi maka akan lebih baik bila dikemukakan lebih dahulu. organisasi adalah bentuk setiap peserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama organisasi suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan. Budaya organisasi juga merupakan iklim komunikasi yang berakar pada seperangkat norma yang sama dan skema interpretatif tentang gejala yang terjadi seseorang (anggota) bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

(Tilaar, 2014) Organisasi kemahasiswaan adalah wadah untuk membentuk demokrasi dalam diri setiap mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) yang bersikap otonom yang dibawah naungan keluarga besar HMPS PPKn. Maka dari itu mahasiswa harus memiliki tanggungjawab dan melibatkan mahasiswa dalam organisasi dimana mahasiswa itu harus mempunyai jati diri untuk peningkatkan pola pikir melalui HMPS sebagai organisasi mahasiswa program studi seharusnya mampu mencari pribadi yang kreatif, tanggungjawab, responsif, dan berjiwa demokratis sehingga dapat berpikir secara rasional dan objektif serta mampu bertindak demi penciptanya profesionalitas dalam suatu lembaga, mampu melahirkan mahasiswa menjadi seorang pemimpin yang demokrasi menjunjung tinggi nilai moral pancasila berakal mulia

Tetapi pada kenyatannya Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn HMPS dirasakan belum maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai organisasi kemahasiswaan, salah satu contohnya adalah HMPS PPKn belum mampu mengembangkan sikap demokrasi mahasiswa PPKn dalam suatu musyawarah dan mufakat, dalam konteks HMPS PPKn misalnya masih banyak dari mahasiswa PPKn tidak mau ikut konteks yang ada di HMPS, diantara peserta konteks terkadang masih ada yang tidak mampu menahan emosi ketika mengutrakan pendapat ada juga yang hanya menyimak saja tanpa memberikan pendapat, sama sekali ada juga asik mengobrol sama teman sebelahnya dan juga yang diam saja, sehingga terkesan semuanya hanya mementingkan egonya masing-masing tanpa menghargai forum.

Musyawarah untuk mufakat bersumber kepada Hukum Adat. Dalam hal ini berarti cara pengambilan keputusan dengan musyawarah yang didasari dengan toleransi, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu atau kelompok. Konsepsi 'musyawarah mufakat' muncul dari tradisi kultural bangsa Indonesia (Permatasari &kk, 2014) Musyawarah mufakat bagi sebuah organisasi itu sangatlah penting begitu pula bagi HMPS PPKn, karena

didalamnya masih banyak sekali yang dapat diambil manfaat bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat, taat terhadap hasil keputusan bersama, menerima pendapat orang lain dan sebagainya. Adapun makna musyawarah mufakat itu sendiri antara lain : musyawarah merupakan membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan untuk mencapai mufakat,

(Suwanto, 2016) Untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat mufakat yang ditingkatkan untuk melaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab. Namun dalam kenyataannya yang terjadi didalam lingkungan mahasiswa apabila diajak musyawarah mufakat masih banyak yang memperhatikan kepentingan pribadi, karena ada mahasiswa yang memaksakan kehendakan pada orang lain, kurang semangat kekeluargaan, kurang etika baik dan rasa tanggungjawab sebagai mahasiswa akan tugasnya antara lain pada saat diskusi, tugas kelompok, rapat anggota HMPS dan sebagainya

Tujuan sikap demokrasi Sikap pada awalnya diartikan sebagai suatu syarat untuk munculnya suatu tindakan atau konsep itu kemudian berkembang semakin luas dan digunakan untuk mengamabarkan adanya suatu niat yang khusus untuk umum, berkaitan dengan kontrol terhadap respon pada keadaan tertentu. Dapat menyimpulkan bahwa sikap adalah yang ada didalam diri seseorang. Pada awalnya istilah sikap digunakan untuk menunjukkan jati diri seseorang atau status mental individu. Oleh sebab itu sikap mental individu diajarkan kepada suatu objek tertentu dan sifatnya masih tertutup. (Azwar, 2005) sikap merupakan sikap sebagai pola perilaku, predisposisi untuk menyusikan diri secara sederhana dan juga respon terhadap stimuli sosial yang dikondisikan.. maka sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak. sikap adalah konsep yang dibentuk oleh tiga komponen yaitu kognitif, efektif, dan perilaku. Komponen kognitif yang berisi semua pemikir serta ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap.

Isi pemikiran seseorang meliputi hal-hal yang diketahuinya disekitar objek sikap, dapat berguna tahapan atau keyakinan, atribusi, dan tentang objek sikap. Kemudian komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap. Adanya komponen afektif dari sikap, dapat diketahui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Selanjutnya komponen perilaku dapat diketahui melalui respon subjek atau berkenaan dengan objek sikap. Respon yang dimaksud dapat berupa tindakan atau perbuatan yang dapat diamati dan dapat dapat berupa intensi atau niat untuk melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan objek sikap. bahwa sikap menentukan kekhasan perilaku seseorang dalam hubungan dengan simulasi manusia atau kejadian-kejadian tertentu. sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku”.

(Anwar & Ridwansyah, 2012) Komponen kognitif dan suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang mengenai objek tersebut bersifat evaluative yang melihatkan diberikan kualitas disukai atau disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap objek. Komponen afektif dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang berkaitan dengan objek tersebut. Objek tersebut dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai, beban emosi inilah yang memberi watak tertentu terhadap sikap yaitu watak, tergerak dan termotivasi. Komponen konatif dalam suatu sikap mencakup semua kesiapan perilaku yang berkaitan dengan sikap. Jika seorang individu bersikap positif terhadap objek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau memuji/ mendukung objek tersebut. Jika ia bersikap negatif maka ia akan cenderung untuk mengganggu/ menghukum/ merusak objek tersebut.

(Sarwono, 2018) sikap dapat berbentuk atau berubah melalui empat cara Adopsi adalah kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang dan terus menerus, lama kelamaan cara terhadap diserapkan kedalam dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. diferensiasi adalah dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan bertambah usia,

maka hal-hal yang dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. salah satu bentuk mekanisme system pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan yang dijalankan oleh rakyat. Semua rakyat atau dalam hal ini warga, memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Demokrasi mengizinkan setiap orang untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan pengembangan serta pembuatan hukum. Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. konsolidasi demokrasi meliputi peningkatan secara prinsip terhadap bekerjanya demokrasi beserta seluruh aturan mainnya dan oleh seluruh masyarakat. ai keputusan bersama

(Adlin & Harto, 2018) Pembentukan sikap demokrasi melalui mekanisme musyawarah menjelaskan bahwa mengembangkan sikap demokrasi bukan hanya membentuk jati diri individu yang beraneka ragam, akan tetapi didukung dengan sistem yang mengembangsikap demokrasi tersebut. Pandangan arti demokrasi tidak banyak membantu, Pandangan tersebut tidak banyak memandu kita dalam menentukan demokrasi tidaknya suatu negara, untuk kepeluan itu kita memerlukan konsep demokrasi yang dapat untuk mengenal secara jelas esensi demokrasi. Dengan kata lain, kita perlu memotong perdebatan dalam rangka mencari alat untuk mengenali wajah pokok demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat. Pengertian sempit yang berfokus pada demokrasi sebagai jenis sistem politik tertentu akan sangat membantu. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari suatu sistem psoko-fisik mengarahkan tingkah laku manusia. Maksud dinamis pada pengertian tersebut adalah perilaku mungkin saja berubah-ubah melalui proses pembelajaran atau melalui pengalaman-pengalaman

(Zaini et al., 2016) Sikap terdiri atas tiga kotnponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dankomponen konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan seseorang (behavior belief dan group belief), komponen afektif menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap- . nya. Komponen afektif atau aspek emosional biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap, yang paling bertahan terhadap pengal. lhpengaruh yang mungkin mengubah sikap

Persiapan tahap persiapan adalah tahapan awal bagaimana cara mempersiapkan proses musyawarah dengan matang sehingga dapat terencana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal, seperti dalam menentukan waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan, bekerja sama mempersiapkan adminitrasi, menentukan panitia penentu musyawarah, dan lain sebagainya. Tahapan persiapan ini juga sangat menentukan baik dan tidaknya proses dalam bermusyawarah nanti. Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dalam proses musyawarah, dimana didalamnya terdapat sidang, baik itu sidang pleno maupun sidang paripurna, didalaam persidangan itu juga tentunya terdapat proses saling berdebat dan adu argumen dalam menyepakati pokok bahasan musyawarah dengan aturan yang berlaku. Hasil akhir tahapan hasil akhir adalah tahapan akhir dari proses atau mekanisme dalam musyawarah, dimana dalam hasil akhir ini mendapatkan hasil kesepakatan dalam musyawarah yang telah disepakati oleh seluruh anggota maupun perangkat musyawarah, yang nantinya hasil ini diartikan sebagai kebijakan baru yang akan ditaati aatau dipenuhi oleh seluruh anggota.

Musyawarah bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat organisasi himpunan mahasiswa program studi HMPS PPKn di kampus Universitas Kanjuruhan Malang secara garis besar sesuai yang dijabarkan oleh Khavari Indikator melaksanakan musyawarah antara lain saling menghargai tutur kata baik, kesabaran, bersedia berbicara, bersedia mendengar, dan memberi maaf. Musyawarah untuk mufakat sangat diutamakan kerana hal tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sesuai dengan musyawarah untuk mufakat adalah cara bagi bangsa Indonesia.

(Hemafitria, Octavia, & Novianty, 2015) ciri-ciri musyawarah dan mufakat antara lain: Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama, Pembicara harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk

akal 4. Jhasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat, Musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluarga, kebersamaan, kesabaran, jujur, saling memberi atau menerima musukan. Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas negara Indonesia dalam meyelesaikan masalah, baik dalam rapat maupun pembahasan-pembahasan lain. Setiap pembahasan yang berkaitan dengan agenda kegiatan memerlukan pemikiran dari anggota. Kenyataan pada saat ini musyawarah untuk mufakat mulai ditinggalkan oleh organisasai.

Hal itu ditandai pada saat pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara voting. Bentuk sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah untuk mufakat dalam rapat anggota HMPS PPKn pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat pengurus organisasi HMPS PPKn merupakan keharusan dan yang diutamakan pada topik pembahasan rapat. Tidak hanya di kampus ini saja, tetapi di kampus lain juga ada bentuk organisasi pemerintahan pusat juga berkewajiban untuk melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. beberapa ciri-ciri dalam melakukan musyawarah mufakat dalam rapat pengurus HMPS PPKn sebagai berikut: Anggota sebagian besar memperhatikan pengarah dan mengganggu usulan selesai yang disampaikan pihak lain, kemudian baru menyampaikan pendapatnya dalam rapat. Anggota rapat sebagai besar membuka pembicaraan dengan salam dalam musyawarah untuk mufakat. Pengurus dan anggota rapat akan menunda musyawarah apabila belum mencapai kata sepakat dan berusaha untuk tersenyum apabila salah satu gagasannya tidak diterima dalam rapat. Anggota yang ingin berbicara, sebagai sebagian besar mengangkat tangan terlebih dahulu dan beri kesempatan untuk memberikan pendapat. c. Anggota sebagian besar mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan dan tidak berbuat kegaduhan ketika ada pihak yang memukakan pendapat saat musyawarah.

(Misi, Keadilan, & Pks, 2016) Organisasi berasal dari bahasa latin organum yang berarti alat atau mendefinisikan organisasi sebagai kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (Gitosudarmo & Sudita, 2010). Organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama organisasi adalah kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu.

Unsur-unsur organisasi, Dari pengertian organisasi yang telah penulis uraikan diatas, maka kita kita dapat menentukan beberapa unsur yang mana dengan unsur-unsur tersebut suatu organisasi akan berbentuk. Unsur-unsur itu antara lain: Wadah atau bentuk perserikatan Wadah ini ditunjukkan dengan nama organisasi tersebut. Sekelompok orang Dikatakan sekelompok jika minimal dua orang atau lebih, diaman orang-orang tersebut ada yang bertindak sebagai pemimpin dan bawahannya. Kerjasama orang-orang yang berserikat Dengan adanya kerjasama antara orang-orang berserikat tersebut, maka tentu ada pula: Pembagian tugas (wewenang), tanggungjawab, hak, kewajiban, Struktur organisasi, Aturan, asas atau prinsip yang mengatur kerjasama tersebut. Tujuan bersama yang hendak dicapai. Tujuan ini merupakan kesepakatan dari orang yang berserikat tersebut, yang akhirnya dikenal dengan istilah "tujuan organisasi:." Masih banyak lagi unsur-unsur organisasi kalau kita perinci lebih mendetail, misalnya: tempat kedudukan, aktivitas, lingkungan dan teknologi. Namun, dengan bergabungnya ketiga unsur (orang, kerjasama dan tujuan) yang uraikan diatas, setidaknya akan terbetuknya suatu organisasi.

(Irawati Elmubarak, 2015) Organisasi sebagai ilmu pengetahuan Organisasi selalu berkembang seiring dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu. Peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti akan mengukir sejarah ilmu pengetahuan. pengalaman berorganisasi memberikan bekal kepada lulusan perguruan tinggi dalam berbagai hal, antara lain: kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir logis sistematis, kemampuan menyampaikan gagasan dimuka umum, kemampuan melaksanakan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksana dan evaluasi,

kemampuan memimpin, serta kemampuan memecahkan masalah. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan akan berefek pada perubahan mengenai sosialisasi, ilmu-ilmu sosialisasi kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan yang pada dasarnya diajarkan dalam kurikulum normatif perguruan tinggi (Munir Salam Setiawan dkk, 2010), Dari pendapat di atas dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah untuk melatih seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain juga bisa berkomunikasi, juga mampu menyampaikan gagasan di depan umum

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan yang bersifat deskriptif. yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan secara sistematis melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Metode yang digunakan peneliti ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi secara langsung, komunikasi langsung, teknik dokumentasi dan triangulasi. Agar peneliti dapat melakukan secara mendalam maka subyek yang diteliti adalah pengurus HMPS PPKn yang diambil sebagai sampel penelitian sebanyak 11 orang. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan mendapatkan data-data dari sumber selain yang telah ada yang dijelaskan di atas, selama data dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pemahasan

Peneliti akan menguraikan hasil temuan yang diperoleh selama saya melakukan penelitian di lapangan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sehubungan dengan pembentukan sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah pada pengurus HMPS PPKn. Untuk menguraikan hasil temuan pada bab ini peneliti sudah menggunakan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Namun sebelum memaparkan data pada tempat penelitian ini peneliti memberikan gambaran di kampus yang dimana saya melakukan penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dengan dilakukan cara tatap muka antara informan dan peneliti. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam wawancara teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 11 informan. yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui observasi yang dilakukan untuk mengecek kebenaran dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap observasi dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Cara Pembentukan Sikap Demokrasi Melalui Fungsi Musyawarah Mufakat Pada Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn (HMPS PPKn) peneliti melakukan satu tempat untuk di observasi. Tempat yang peneliti observasi adalah di sekret HMPS PPKn di mana tempat ini sebagai tempat melakukan musyawarah. tempat tersebut menjadi tempat yang diobservasikan oleh peneliti karena berdasarkan hasil wawancara tempat ini adalah sebagai tempat dimana kelompok pengurus HMPS PPKn melaksanakan musyawarah atau pertemuan setiap ada kegiatan

.Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi dilakukan dengan cara mengecek kebenaran dari wawancara yang dilakukan peneliti. Tahap observasi dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pembentukan sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah mufakat pada pengurus himpunan mahasiswa program studi PPKn (HMPS PPKn) di Universitas Kanjuruhan Malang. peneliti melakukan penelitian 1 tempat untuk observasi, tempat observasi peneliti adalah sekret HMPS PPKn sebagai tempat pelaksanaan dalam melakukan pertemuan saat ada kepentingan-kepentingan pada mahasiswa PPKn terutama pengurus dan sebagai tempat untuk bermusyawarah mahasiswa PPKn. Berdasarkan hasil wawancara satu tempat ini sebagai tempat dimana pengurus HMPS PPKn sebagai tempat untuk bermusyawarah terutama bagi mahasiswa PPKn untuk mendapat pengetahuan dalam hidup berorganisasi..

Dokumentasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang Bagaimana Cara Pembentukan Sikap Demokrasi Melalui Fungsi Musyawarah Mufakat Pada Pengurus HMPS PPKn adalah foto-foto saat penelitian melakukan observasi. Foto tersebut

terdiri dari foto saat melakukan observasi di sekret HMPS PPKn dan foto kegiatan yg dilakukan pengurus HMPS PPKn. Dokumen lain yang di gunakan untuk menjunung hasil temuaan peneliti adalah hasil kegiatan musyawarah mufakat sebelum yang di lakukan oleh pengurus HMPS PPKn.

Teori yang ada pada pembahasan bab ini adalah teori ynag sudah di paparkan sebelumnya. Gagasan penemuan ditempat penelitian juga akan dibahas pada bab ini serta dipadukan dengan gagasan peneliti. jurusan PPKn di Universitas Kanjuruhan Malang. (Zuchdi, 1995)Manusia dapat dikatakan tidak terlepas dari lingkungan masyarakat tempat hidup bersama serta berinteraksi dengan individu yang lain menunjukkan bahwa mahasiswa yan aktif dalam organisasi cenderung mengalami konflik peran atau inter-role, Setiap mahasiswa yang aktif dalam oeganisasi dituntut untuk mampu mengatur dan mengendali waktu untuk menghadapi tugas- tugas atau pun kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang diikuti. Indonesia sangat berpotensi menjadi iblat demokrasi dikawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi negara Indonesia.

(Budaya et al., 2010) dalam bukunya mengungkapkan adanya teori-teori yang membahas tentang konsep demokrasi. Adapun teori-teori tersebut adalah Pertama yaitu teori teori protektif demokrasi yaitu teori demokrasi yang menekankan adanya jaminan akan hak-hak warga negara. Teori ini seringkali dikaitkan dengan proteksi terhadap kaum-kaum kapitalis. Teori ini menjelaskan bagaimana negara atau pemerintahan memberikan jaminan akan berlangsungnya jaminan persaingan bebas dan jaminan akan kepemilikan bagi setiap individu. Teori selanjutnya adalah teori demokrasi pluralis, yaitu sebuah pemerintahan akan diperoleh melalui kompetisi pemilihan. Merka dipilih oleh rakyat akan memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan.”

Dalam membentuk oeganisasi banyak orang mendirikan suatu organisasi dengan mudahnya, namun banyak juga yang mampu mengelola atau memelihara kelasungan hidupnya serta mengembangkannya untuk membentuk serta menjalankan sehingga tujuan yang dinginkn dapat dicapai dengan gemilang. Dalam pembentukan sikap demokrasi ini juga salah satunya melalui pemilihan umum ketua HMPS PPKn disebut dan dipopulerkan sebagai pesta demokrasi, suatu pesta sakral yang melibatkan mahasiswa PPKn sebagai implementator atau pelaksanaa untuk memilih.

Pengertian demokrasi adalah suatu sistim politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala, ada pun makna dari musyawarah itu sendiri anatara lain Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan untuk mencapai mufakat (suwanto 2010:35). Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah mufakat pada pengurus HMPS PPKn adalah organisasi khusus bagi mahasiswa Pernyataan ini peneliti dapat ditemukan saat melakukan penelitian dilapangan. Didalam kehidupan mahasiswa pasti banyak perkembangan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah organisasi dan juga mendapat ilmu baru dari organisasi tersebut. laswrance green (2003:116) perilaku atau sikap ada dua faktor salah satunya faktor pemungkinan, yang mencakup lingkungan fisik, atau tidak tersedia fasilitas-fasilitas atau sarana keselamatan kerja.

Dalam pembentukan sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah mufakat pada pengurus HMPS PPKn adalah melalaui musyawarah besar, musyawarah besar adalah kegiatan tahunan oleh mahasiswa HMPS PPKn untuk mengajikan AD/ART HMPS PPKn UNIKAMA. Musyawarah besar merupakan evaluasi kinerja pengurus untuk perbaikan kedepannya, dengan adanya musyawarah untuk mufakat pada pengurus HMPS PPKn. Mahasiswa PPKn ikut serta atau partisipasi dalam organisasi tersebut untuk mendapat wawasan atau pengetahuan. Maka dapat disimpulkan , demokrsi merupakan sarana kedaulatan yang mermberei kebebasan atau seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengemukakan ide, gagasan, maupun tindakan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hakikat manusia.

Hambatan dalam pembentukan sikap demokrasi pada pengurus HMPS PPKn. Yang mereka lihat hambatan selama ini dalam bermusyawarah adalah tidak konsisten dengan waktu, salah satu hambatan pada pengurus HMPS PPKn, masih banyak pengurus yang terlambat saat melakukan pertemuan dan juga musyawarah besar, maka itu terjadi hambatan yang ada dalam HMPS PPKn. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lapangan bahwa organisasi HMPS PPKn di Universitas Kanjuruhan Malang, yang dirasakan oleh pengurus HMPS PPKn dengan adanya sikap demokrasi melalui fungsi musyawarah mufakat pada pengurus HMPS PPKn ada membawa perubahan yang positif yang dirasakan oleh mahasiswa.

Kesimpulan

HMPS PPKn merupakan organisasi Kemahasiswaan di jurusan PPKn di Universitas Kanjuruhan Malang. salah satu program studi yang relatif lama keberadaannya di Kota Malang. Pembentukan sikap demokratis melalui fungsi musyawarah arti penting dan manfaat musyawarah bagi diri sendiri mahasiswa dan HMPS PPKn, menyampaikan pendapat tentang musyawarah yang demokratis, bentuk-bentuk sikap demokratis dalam musyawarah. Mengetahui arti musyawarah, memahami manfaat yang diperoleh bagi diri sendiri dan HMPS PPKn dari musyawarah, berani untuk menyampaikan pendapat, mampu bersikap menghargai, menghormati, tegas, bijak serta taat terhadap peraturan yang ada dalam musyawarah sudah dapat dinilai baik walaupun masih ada beberapa anggota dan pengurus HMPS PPKn yang belum mampu untuk melakukan hal itu.

Referensi

- Adlin, A., & Harto, S. (2018). Pemetaan Sikap Demokratis Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2012. In *Sorot*.
<https://doi.org/10.31258/sorot.7.2.2005>
- Anwar, M., & Ridwansyah, A. (2012). *IMPLEMENTASI BUDAYA DEMOKRASI UNTUK MEMBENTUK CIVIC DISPOSITION PADA HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IKIP-PGRI PONTIANAK*. 217–228.
- Azwar. (2005). Teori Perilaku. *Teori Perilaku*, 5–28.
- Budaya, P., Dalam, D., Hmj, K., Dan, H., Malang, U. N., Irawan, H., ... Dan, P. (2010). *Pelaksanaan budaya demokrasi dalam pemilihan ketua hmj hukum dan kewarganegaraan universitas negeri malang*.
- Budiyono, B., & Kokotiasa, W. (2018). ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA IKIP PGRI MADIUN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 135.
<https://doi.org/10.25273/citizenship.v1i2.1104>
- Hemafitria, Octavia, E., & Novianty, F. (2015). Implementasi sikap demokrasi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak (studi deskriptif pada mahasiswa semester ii prodi PPKn tahun akademik 2014/2015). *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(2), 173–182. Retrieved from <http://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view/103>
- Irawati, R. P., & Elmubarok, Z. (2015). Pengembangan Buku Ajar Bahasa Indonesia Tematik Berkarakter Bagi Siswa Sd Melalui Sastra Anak. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 81–96.
- Misi, V., Keadilan, P., & Pks, S. (2016). *Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Sosial*. 15(2), 90–102.
- Mukmin, B. A., & Prayetno, P. (2018). Penerapan Model Problem Based Learning untuk

Meningkatkan Aktivitas Belajar pada Mata Kuliah Teori Politik dan Demokrasi. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 63.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9526>

- Permatasari, D., & Seftyono, C. (2014). Musyawarah Mufakat atau pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2), 1–13.
- Purnomo, S. (2018). PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA: ANTARA ASA DAN REALITA. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 66–84. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i2.553>
- Said, M.-E., Goldstein, H., Korra, A., & El-Kashlan, K. (2010). Blindness Prevalence Rates in Egypt: A Comparison of Random and Self-Selected Samples of Urban and Rural Residents, by Affection and Etiology. *Health Services Reports*, 88(1), 89. <https://doi.org/10.2307/4594733>
- Sarwono, S. (2018). MOTIVASI BERPRESTASI DAN PERCEPATAN KARIR PUSTAKAWAN AHLI DALAM PRESPEKTIF GENDER (Studi di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada). *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/bip.7726>
- Suwanto, S. (2016). PERAN SERTA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA SEMARANG DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARI'AH DI KOTA SEMARANG. *INFERENSI*, 6(2), 393. <https://doi.org/10.18326/infs13.v6i2.393-416>
- Tilaar, S. (2014). Analisis Pencemaran Logam Berat di Muara Sungai Tondano dan Muara Sungai Sario Manado Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*, 2(1), 32–39.
- Wulan, D. A. N., & Abdullah, S. M. (2014). Prokrantisasi Akademik Dalam Penyelesaian Skripsi. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 5(1), 55–74. Retrieved from <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/soshum/article/view/136>
- Zaini, N. A. M., Osman, A., Hamid, A. A., Ebrahimpour, A., Saari, N., Yuliarti, O., ... a, A. B. Y. (2016). Preliminary Exam Time-table for Semester 1 , 2015 / 2016 (Undergraduate). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2(1), 27–33. <https://doi.org/10.1038/nprot.2007.376>
- Zuchdi, D. (1995). Pembentukan Sikap. *Cakrawala Pendidikan*, Nomor 3(November 1995), 51–63.